

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam

UUD 1945 pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau *voter* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Sistem pemilu kepala daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat

daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.

Pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya. Potensi rendahnya partisipasi pemilih masih menghantui pemilu 2015. Dibutuhkan langkah strategis lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilih di setiap pemilu cenderung mengalami penurunan. Tingkat partisipasi pemilih Lampung dalam tiga kali pemilu, yakni 1999, 2004, dan 2009, secara konsisten terus mengalami penurunan. Pada pemilu 2009 lalu, tingkat partisipasi pemilih hanya 70,99%. Padahal, pada pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,99%, sedangkan pada 2004 mencapai 84,07%. Tren penurunan itu harus segera disikapi serius oleh penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah (<http://lampost.co/berita/rendahnya-partisipasi-pemilih-hantui-pemilu-2014>, diunduh tanggal 1 Juni 2015).

Desa Marga Agung terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah penduduk 4.862 jiwa ini, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan beternak. Latar belakang masyarakat desa Marga Agung dengan mata pencarian petani dan beternak, dalam menghadapi pemilihan umum sebagian masyarakat desa Marga Agung cenderung tidak menaruh minat

terhadap objek politik yang luas (budaya politik parokial) dan partisipasi politiknya cenderung rendah. Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Lampung tahun 2014, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, seperti diterangkan dalam tabel 1 :

Tabel 1
Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung di Desa Marga Agung Tanggal 9 April 2014

NO	Uraian	Rekapitulasi jumlah pemilih		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (berdasarkan DPT+DPTb+DPK+DPKTb). Diisi dari B5 Model C1-KWK	1157	1200	1357 (69 %)
2	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	380	237	617 (31%)
Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				100%

Sumber :KPPS Desa Marga Agung

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kampanye di desa oleh calon kepala daerah. Tingkat golput tidak hanya terjadi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Lampung di Desa Marga Agung tahun 2014, tetapi terjadi pada pemilihan anggota DPR di Desa Marga Agung tahun 2014, seperti terlihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hasil Penghitungan Pemilihan Anggota DPR di Desa Marga Agung Tahun 2014

No	Uraian	Rekapitulasi jumlah pemilih		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1537	1437	2974
2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1157	1200	2357 (79,25%)
3	Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih	380	237	617 (20,74%)

Sumber :KPPS Desa Marga Agung

Penelitian tentang partisipasi politik telah menjadi tema yang menarik dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu antara lain adalah pertama, penelitian oleh Tarigan (2008:52) dalam skripsinya yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survai, untuk maksud penjelasan (*explanatory atau confirmatory*). Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada pada penelitian ini adalah popularitas calon dan kondisi sosial politik. Sedangkan hubungan yang positif berdasarkan analisis regresi hanya pada popularitas calon, sedangkan status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi politik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2013:24), dalam jurnal yang berjudul *Faktor-faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jabar 2013*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemilih pemula di Kecamatan Andir menyatakan memiliki faktor penghambat yang membuat mereka tidak dapat ikut berpartisipasi dalam Pilgub Jabar 2013, seperti faktor kurangnya dukungan untuk mensukseskan yang mereka rasakan dari lingkungan sekitar mereka, kemudian induk organisasi dimana mereka menjadi bagiannya yang membuat mereka sulit untuk bisa berpartisipasi dalam Pilgub Jabar 2013, dan ada pula pemilih pemula

yang otonom yang benar-benar enggan berpartisipasi pada Pilgub Jabar 2013 kemarin karena menurut mereka suara mereka tidak penting.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mudjiyanto (2012:10). Dalam jurnal yang berjudul *Literasi Internet Dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Aktifitas Pemanfaatan Media Baru* menjelaskan bahwa menyangkut tipologi partisipasi politik, maka secara *over all* responden umumnya merupakan para pengguna internet yang tipologi partisipasi politiknya itu masih apatis. Cukup banyak juga di antara responden yang partisipasi politiknya itu sudah bertipologi spektator. Sementara partisipasi politik yang bertipologi *gladiator* hampir tidak ada dan bahkan tidak satupun responden yang bertipologi politik pengkritik.

Hasil penelitian Ardian (2014) tentang *Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Lampung*, dimana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih melalui: (1). Strategi Penguatan, upaya untuk meningkatkan partisipasi dengan melihat kualitas KPU, yaitu meningkatkan koordinasi antar anggota KPU baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilu, memperkuat komunikasi dan keterbukaan KPU kepada publik serta memberikan jaminan ketersediaan sejumlah data yang akurat. (2). Strategi Rasionalisasi, upaya yang dilakukan adalah dengan membuat selebaran kertas yang berisikan nama-nama calon legislatif baik Provinsi atau Kabupaten, selain itu memberikan informasi melalui media suara (radio), gambar atau baliho. (3). Strategi Bujukan, melakukan program jalan

sehat, sepeda gowes, KPU goes to campus serta dialog pemilu secara langsung kepada masyarakat. (4). Strategi Konfrontasi, berupa sosialisasi cara memilih dan kerugian jika tidak memilih, maka pihak KPU mengajak masyarakat untuk memilih, karena jika tidak memilih, maka akan hilang hak politiknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak penyebab yang membuat masyarakat untuk tidak berpartisipasi atau berpartisipasi dalam pemilihan umum, seperti popularitasnya calon yang membuat masyarakat berpartisipasi politik, kondisi sosial politik yang menunjukkan hubungan negatif terhadap partisipasi politik pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung dan transparan merupakan jawaban atas aspirasi rakyat. Pilkada itu terdiri dari pemilu Legislatif, pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan pemilu Kepala Desa. Dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Peningkatkan partisipasi politik rakyat melalui keterlibatannya dalam pembangunan nasional, serta kegiatan pengawasan diperlukan agar pemerintahan tetap berjalan pada jalur yang benar untuk untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat. Fenomena yang demikian, tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Marga Agung dalam pemilu.

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik guna mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam mengawal pemilu. Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentunya kesadaran politik mereka juga rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa tidak adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang signifikan khususnya Desa Marga Agung atau dengan kata lain tingkat partisipasi masyarakat Desa Marga Agung pada pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015 rendah karena belum adanya kampanye. Kondisi inilah yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung pada pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat peneliti simpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Marga Agung pada pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Marga Agung dalam mengikuti pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung pada pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khususnya partisipasi politik masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung pada pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.